

**SATUAN ACARA PENGAJARAN  
HUKUM PRANATA PEMBANGUNAN / 2 SKS**

| PERTEMUAN | POKOK BAHASAN DAN TIU                            | SUB POKOK BAHASAN DAN TIK  | TUJUAN INSTRUKSI KHUSUS  | TEKNIK PEMBELAJARAN | MEDIA PEMBELAJARAN  | TUGAS | REF.  |
|-----------|--|--|--|---------------------|---------------------|-------|-------|
| I         | Pengantar Hukum Pranata Pembangunan              | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pengertian Hukum Pranata</li> <li>▶ Struktur Hukum Pranata</li> <li>▶ Contoh-contoh umum dan Studi Banding</li> </ul> | <p>*Penanaman pemahaman Dasar tentang Hukum, Pranata pembangunan dan struktur serta kedudukanya dalam ranah Hukum.<br/>*Diberikan beberapa contoh kasus dan studi banding untuk membentuk persepsi awal tentang dunia hukum dan kaitannya secara khusus dengan bidang arsitektur</p> | Tutorial + Diskusi  | Papan Tulis dan OHP | -     | 1,2,3 |
| II        | Undang-undang dan Peraturan Pembangunan Nasional | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Tata Hukum Kebijakan Negara</li> <li>▶ Peraturan Pemerintah dan Perda</li> </ul>                                      | <p>*Membentuk pemahaman umum tentang instrumen hukum di Indonesia yang mengatur kebijakan pusat dan daerah baik secara sektoral maupun teritorial.<br/>*Mengkritisi kasus aktual di masyarakat seputar <i>law inforcement</i>, penyimpangan dll</p>                                  | Tutorial + Diskusi  | Papan Tulis dan OHP | -     | 1,3,6 |
| III       | Undang-Undang dan Peraturan Pembangunan Nasional | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ UU No.24 Th.1992 tentang Tata Ruang</li> </ul>  | <p>*Membangun pengertian atas penataan ruang dan status hukumnya, mencakup distribusi ruang nasional dan lokal<br/>*Mengkritisi studi kasus terkini menyangkut syarat teknis, Izin dan peran serta masyarakat.</p>   | Tutorial + Diskusi  | Papan Tulis dan OHP | -     | 2,5   |

| PERTEMUAN | POKOK BAHASAN                                    | SUB POKOK BAHASAN                   | TUJUAN INSTRUKSI KHUSUS   | TEKNIK PEMBELAJARAN | MEDIA PEMBELAJARAN  | TUGAS | REF.  |
|-----------|--|-------------------------------------|---|---------------------|---------------------|-------|-------|
| IV        | Undang-Undang dan Peraturan Pembangunan Nasional | ► UU No.4 th 1992 tentang Pemukiman | *Membentuk pemahaman tentang hak memiliki rumah berikut kewajibannya yang diatur oleh pemerintah. Juga kebijakan tentang Rumah Susun<br>*Mampu mengkritisi fenomena permasalahan pemukiman saat ini mis, kepadatan, kumuh, pemilikan, sengketa tanah, fungsi dll                    | Tutorial + Diskusi  | Papan Tulis dan OHP | -     | 1,2,3 |
| V         | Hukum Perikatan                                  | ► Perjanjian                        | *Penjelasan secara mendetail tentang perikatan yang timbul karena perjanjian, pihak-pihak yang terlibat, isi persetujuan dan persyaratannya.<br>*Tercapai Pemahaman tentang proses pelaksanaan perjanjian, factor yang berpengaruh dan kedudukan perjanjian dalam aturan KUHPerdara | Tutorial + Diskusi  | Papan Tulis dan OHP | -     | 4     |
| VI        | Hukum Perikatan                                  | ► Undang-Undang                     | *Penjelasan secara mendetail tentang perikatan yang timbul Undang-undang. Juga perbuatan melawan hukum baik oleh orang maupun badan hukum serta peraturannya dalam KUHPerdara   | Tutorial + Diskusi  | Papan Tulis dan OHP | -     | 1,4   |

| PERTEMUAN    | POKOK BAHASAN                 | SUB POKOK BAHASAN   | TUJUAN INSTRUKSI KHUSUS   | TEKNIK PEMBELAJARAN | MEDIA PEMBELAJARAN  | TUGAS                      | REF.    |
|--------------|-------------------------------|---|---|---------------------|---------------------|----------------------------|---------|
| VII          | Hukum Perburuhan              | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Undang-Undang Perburuhan ( Bidang Hubungan Kerja ) :               <ul style="list-style-type: none"> <li>• No.12 Th 1948 Ttg Kriteria status dan perlindungan buruh</li> <li>• No.12 Th 1964 ttg PHK</li> </ul> </li> </ul> | <p>*Penggambaran konteks buruh di Indonesia, peranan dan kedudukannya dalam hukum.</p> <p>*Terjelaskan pemahaman mendasar tentang hak dan kewajiban tenaga kerja, meliputi usia, masa kerja jenis pekerjaan, PHK dll.</p> <p>*Diangkat juga kondisi aktual di Indonesia, berbagai studi kasus sebagai pengembangan analisis</p> | Tutorial + Diskusi  | Papan Tulis dan OHP | -                          | 1,3,4,7 |
| VIII         | Perencanaan Fisik Pembangunan | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Skema Proses Perencanaan Fisik</li> <li>▶ Distribusi Tata Ruang Lingkup Nasional</li> <li>▶ Sistem Wilayah Pembangunan</li> </ul>  | <p>*Terbentuk pemahaman mendasar tentang perencanaan fisik, proses dan tata alirnya dalam ruang lingkup nasional</p> <p>*Mampu mengenal dan menganalisis system wilayah pembangunan dan proyek fisik pembangunannya</p> <p>*Mencermati Implikasi Distribusi Tata Ruang Lingkup Nasional dengan UU No.24 tentang Tata Ruang</p>  | Tutorial + Diskusi  | Papan Tulis dan OHP | Paper Analisis studi kasus | 5,6     |
| <b>U T S</b> |                               |   |   |                     |                     |                            |         |

| PERTE-MUAN | POKOK BAHASAN                         | SUB POKOK BAHASAN  | TUJUAN INSTRUKSI KHUSUS  | TEKNIK PEMBELAJARAN | MEDIA PEMBELAJARAN  | TUGAS | REF.  |
|------------|---------------------------------------|--|--|---------------------|---------------------|-------|-------|
| IX         | Peranan Perencanaan Fisik Pembangunan | Peranan Perencanaan dalam <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Lingkup Nasional</li> <li>▶ Lingkup Regional</li> <li>▶ Lingkup Lokal</li> <li>▶ Lingkup Sektor Swasta</li> </ul> | Mengkaji secara lanjut konsep perencanaan yang telah berjalan di Indonesia dilihat dari 4 lingkup dan mengidentifikasi peranan dan efektifitasnya terhadap pranata pembangunan Nasional.   | Tutorial + Diskusi  | Papan Tulis dan OHP | -     | 5,6   |
| X          | Environment Impact Analysis (AMDAL)   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pengertian AMDAL</li> <li>▶ Parameter AMDAL</li> <li>▶ Inti AMDAL</li> <li>▶ Proses AMDAL dalam Hukum Pranata Pembangunan</li> </ul>        | <p>*Terbentuk pemahaman mendasar atas urgensi keseimbangan ekologi dan mampu menerapkan analisis yang tepat atas gejala-gejala yang berdampak positif dan negatif.</p> <p>*Tergugah kesadaran merencana dengan wawasan lingkungan dan peka diri terhadap segala dampak dan hukumnya.</p> | Tutorial + Diskusi  | Papan Tulis dan OHP | -     | 2,5,6 |
| U A S      |                                       |  |  |                     |                     |       |       |

[ydnugra@yahoo.com](mailto:ydnugra@yahoo.com), [yudi\\_nugraha02@eng.ui.ac.id](mailto:yudi_nugraha02@eng.ui.ac.id)

### Reference:

1. Mudjiono SH, *Pengantar Hukum Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1991
2. Asep Warlan, *Bahan Kuliah Pranata Pembangunan*, Univ. Parahyangan Bandung, 1997
3. E. Utrecht, Moh.Saleh Djindang, *Pengantar Dalam Hukum di Indonesia*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983
4. Abd. Kadir, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992
5. Johara T. Jayadinata, *Tata Guna Tanah dalam Perencanaan Pedesaan, Perkotaan dan Wilayah*, ITB Bandung, 1986
6. Ir. Djoko Sujarto, *Beberapa Pengertian Tentang Perencanaan Fisik*, Bhatara Karya Aksara, Jakarta, 1985
7. Imam Supomo, *Hukum Perburuhan Bidang Tenaga Kerja*, Penerbit Djambatan, 1975